




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAKARTA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT**

Nomor POS	: UPNVJ/POS/HUMAS/ 07 /23-00
Tanggal Pembuatan	: 7 Januari 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 16 Januari 2023
Disahkan Oleh	:  Kepala UPT Hubungan Masyarakat, Windhi Tia Saputra, S.Sos., M.Si NIK. 215121166
Nama POS	: Sengketa Informasi Publik

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan kamera foto dan video.
2. Memiliki pengetahuan tentang hubungan masyarakat.
3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi.
4. Memiliki kemampuan dalam bidang arsip digital.

**Keterkaitan:**

1. POS Pemutakhiran dan Penetapan Informasi Publik
2. POS Uji Konsekuensi
3. POS Pengelolaan Keberatan

**Peralatan/ Perlengkapan:**

1. Personal Komputer
2. Jaringan internet
3. Scanner
4. Pesawat telepon

**Peringatan:**

Apabila POS ini tidak dilaksanakan, maka penyelesaian sengketa informasi publik akan terhambat dan tidak dapat terlaksana.

**Pencatatan dan Pendataan:**

Dicatat oleh unit kerja secara manual dan/atau elektronik.

POS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan Tim yang akan menangani sengketa dan memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Standar informasi publik	3 hari	Disposisi dan surat kuasa	
2	Menerima surat kuasa dan melakukan analisis, dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi bersama tim pertimbangan				Disposisi dan surat kuasa atasan PPID	5 hari	Pertimbangan tertulis dan dokumen pengadilan	
3	Melaksanakan prosedur adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke KI/pengadilan				Lembar disposisi kosong	100 hari	Risalah/berita acara persidangan dan kesimpulan tim penanganan sengketa	
4	Selesai							

